



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KINERJA PERCEPATAN PELAYANAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penilaian terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga, hasil penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha Pemerintah Daerah akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
 8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAYANAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- PERTAMA : Menetapkan hasil penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah sebagai berikut:
1. Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 2. Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 3. Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2021

A.N. MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

PLT SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



IKMAL LUKMAN

Tembusan Yang Terhormat :

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAYANAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL PENILAIAN KINERJA PTSP DAN KINERJA PPB
PEMERINTAH PROVINSI

No	Nama Pemerintah Provinsi (Urutan Disusun Berdasarkan Nilai)	
	Kategori : Sangat Baik (Nilai 80 s.d 100)	Nilai
1	Provinsi Jawa Tengah	93,959
2	Provinsi Sulawesi Selatan	93,672
3	Provinsi Jawa Barat	92,272
4	Provinsi Sumatera Barat	91,740
5	Provinsi Sumatera Selatan	91,552
6	Provinsi Jawa Timur	91,488
7	Provinsi Sulawesi Tengah	91,312
8	Provinsi Kepulauan Riau	89,024
9	Provinsi Bengkulu	87,725
10	Provinsi Bali	86,756
11	Provinsi Banten	86,076
12	Provinsi Gorontalo	84,260
13	Provinsi Kalimantan Tengah	82,004
14	Provinsi Maluku	81,875
15	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80,791
16	Provinsi Kalimantan Utara	80,491
17	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	80,243
	Kategori : Baik (Nilai 60 s.d 79,99)	Nilai
18	Provinsi Riau	79,648
19	Provinsi Kalimantan Selatan	78,260

20	Provinsi Sumatera Utara	78,231
21	Provinsi DKI Jakarta	77,703
22	Provinsi Sulawesi Utara	68,872
23	Provinsi Kalimantan Barat	67,509
24	Provinsi Sulawesi Barat	66,897
25	Provinsi Kalimantan Timur	65,632
26	Provinsi Papua Barat	65,600
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	64,575
28	Provinsi Lampung	60,112
	Kategori : Kurang Baik (Nilai \leq 59,99)	Nilai
29	Provinsi Aceh	57,441
30	Provinsi Jambi	56,173
31	Provinsi Nusa Tenggara Timur	52,667
32	Provinsi Nusa Tenggara Barat	49,572
33	Provinsi Papua	39,839
34	Provinsi Maluku Utara	37,148

A.N. MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA
PLT SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAYANAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL PENILAIAN KINERJA PTSP DAN KINERJA PPB
 PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Pemerintah Kabupaten (Urutan Disusun Berdasarkan Nilai)		
	Kategori : Sangat Baik (Nilai 80 s.d 100)		
	Kabupaten	Provinsi	Nilai
1	Kabupaten Siak	Riau	96,220
2	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan	95,380
3	Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah	93,438
4	Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan	93,359
5	Kabupaten Badung	Bali	93,018
6	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	92,624
7	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	92,532
8	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	92,519
9	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	92,040
10	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	91,994
11	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	91,677
12	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat	91,576
13	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	91,320
14	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	91,120
15	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	90,949
16	Kabupaten Gianyar	Bali	90,846
17	Kabupaten Rokan Hulu	Riau	90,637
18	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	90,393
19	Kabupaten Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	90,272
20	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	90,235
21	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	89,914
22	Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan	89,330
23	Kabupaten Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta	89,284
24	Kabupaten Langkat	Sumatera Utara	89,203
25	Kabupaten Tabanan	Bali	89,000
26	Kabupaten Blitar	Jawa Timur	88,843

27	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	88,595
28	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	88,447
29	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	88,059
30	Kabupaten Pandeglang	Banten	88,033
31	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	87,806
32	Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	87,764
33	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	87,671
34	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	86,708
35	Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	86,706
36	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	86,450
37	Kabupaten Buru	Maluku	86,373
38	Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	86,298
39	Kabupaten Madiun	Jawa Timur	85,354
40	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat	85,124
41	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	85,013
42	Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo	85,008
43	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	85,002
44	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	84,966
45	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	84,378
46	Kabupaten Batanghari	Jambi	84,132
47	Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku	83,811
48	Kabupaten Gunung Kidul	Daerah Istimewa Yogyakarta	83,662
49	Kabupaten Indragiri Hilir	Riau	83,238
50	Kabupaten Seruyan	Kalimantan Tengah	83,217
51	Kabupaten Rokan Hilir	Riau	82,878
52	Kabupaten Kepahiang	Bengkulu	82,779
53	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	82,472
54	Kabupaten Magetan	Jawa Timur	82,393
55	Kabupaten Bengkalis	Riau	82,270
56	Kabupaten Indragiri Hulu	Riau	82,236
57	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	82,207
58	Kabupaten Bogor	Jawa Barat	82,188
59	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	81,856
60	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	81,349
61	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	81,196
62	Kabupaten Demak	Jawa Tengah	81,056
63	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	81,025
64	Kabupaten Aceh Besar	Aceh	80,835
65	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan	80,776
66	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	80,727
67	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	80,550
68	Kabupaten Lampung Tengah	Lampung	80,244
69	Kabupaten Kediri	Jawa Timur	80,208
70	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	80,157
71	Kabupaten Jenepono	Sulawesi Selatan	80,139

Kategori : Baik (Nilai 60 s.d 79,99)			
	Kabupaten	Provinsi	Nilai
72	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	79,806
73	Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan	79,795
74	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	79,054
75	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	78,973
76	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	78,858
77	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan	78,771
78	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	78,555
79	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	78,448
80	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	78,385
81	Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	78,324
82	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	78,284
83	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	78,263
84	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	77,885
85	Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	77,467
86	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	77,446
87	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	77,179
88	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	77,146
89	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu	76,675
90	Kabupaten Bangli	Bali	76,660
91	Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan	76,593
92	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	76,570
93	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	76,556
94	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	76,300
95	Kabupaten Kuantan Singingi	Riau	76,041
96	Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta	75,995
97	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi	75,656
98	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	75,465
99	Kabupaten Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	75,092
100	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	74,865
101	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	74,409
102	Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	74,377
103	Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan	74,364
104	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	74,301
105	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan	73,660
106	Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah	73,628
107	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo	73,579
108	Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat	73,385
109	Kabupaten Kepulauan Yapen	Papua	73,358
110	Kabupaten Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	73,160
111	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	73,144

112	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	72,969
113	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	72,724
114	Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah	72,605
115	Kabupaten Labuhanbatu	Sumatera Utara	72,573
116	Kabupaten Buleleng	Bali	72,515
117	Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu	72,320
118	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	72,312
119	Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara	72,169
120	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	72,078
121	Kabupaten Aceh Timur	Aceh	71,907
122	Kabupaten Pematang	Jawa Tengah	71,849
123	Kabupaten Batang	Jawa Tengah	71,810
124	Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Selatan	71,779
125	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur	71,660
126	Kabupaten Lebak	Banten	71,550
127	Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	71,511
128	Kabupaten Garut	Jawa Barat	71,489
129	Kabupaten Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	71,318
130	Kabupaten Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	71,062
131	Kabupaten Paser	Kalimantan Timur	70,917
132	Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan	70,834
133	Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan	70,647
134	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	70,462
135	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	70,355
136	Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	70,221
137	Kabupaten Blora	Jawa Tengah	70,160
138	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	70,153
139	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	70,039
140	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	70,023
141	Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan	69,671
142	Kabupaten Tulang Bawang	Lampung	69,539
143	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	69,430
144	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan	69,423
145	Kabupaten Majene	Sulawesi Barat	69,376
146	Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur	69,338
147	Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	69,221
148	Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	69,208
149	Kabupaten Manokwari	Papua Barat	69,133
150	Kabupaten Seluma	Bengkulu	69,040
151	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah	69,035
152	Kabupaten Serang	Banten	68,643
153	Kabupaten Aceh Jaya	Aceh	68,641
154	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	68,610

155	Kabupaten Biak Numfor	Papua	68,448
156	Kabupaten Malang	Jawa Timur	67,939
157	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	67,836
158	Kabupaten Enrekang	Sulawesi Selatan	67,755
159	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	67,714
160	Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	67,540
161	Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur	67,413
162	Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan	67,208
163	Kabupaten Kotabaru	Kalimantan Selatan	66,889
164	Kabupaten Karangasem	Bali	66,875
165	Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara	66,844
166	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau	66,578
167	Kabupaten Seram Bagian Barat	Maluku	66,568
168	Kabupaten Mamuju Utara	Sulawesi Barat	66,525
169	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	66,522
170	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	66,514
171	Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	66,435
172	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	66,304
173	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	66,247
174	Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	65,832
175	Kabupaten Sarolangun	Jambi	65,771
176	Kabupaten Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	65,769
177	Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	65,487
178	Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara	65,465
179	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	65,412
180	Kabupaten Pelalawan	Riau	65,188
181	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	65,141
182	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	64,873
183	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	64,638
184	Kabupaten Kutai Barat	Kalimantan Timur	64,384
185	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	64,366
186	Kabupaten Sampang	Jawa Timur	64,132
187	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	64,085
188	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	64,084
189	Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	63,551
190	Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	63,499
191	Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara	63,155
192	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	63,098
193	Kabupaten Boalemo	Gorontalo	63,075
194	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu	63,039
195	Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	63,000
196	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	62,799
197	Kabupaten Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	62,681
198	Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	62,423
199	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	62,385

200	Kabupaten Pesawaran	Lampung	62,349
201	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	62,114
202	Kabupaten Karo	Sumatera Utara	61,557
203	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	61,229
204	Kabupaten Klungkung	Bali	61,089
205	Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan	61,034
206	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	60,878
207	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	60,863
208	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	60,517
209	Kabupaten Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	60,503
210	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	60,499
211	Kabupaten Sikka	Nusa Tenggara Timur	60,223
212	Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	60,177
213	Kabupaten Barito Selatan	Kalimantan Tengah	60,173
Kategori : Kurang Baik (Nilai ≤ 59,99)			
	Kabupaten	Provinsi	Nilai
214	Kabupaten Jembrana	Bali	59,888
215	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan	59,500
216	Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan	59,406
217	Kabupaten Pahuwato	Gorontalo	59,356
218	Kabupaten Jombang	Jawa Timur	59,259
219	Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat	59,129
220	Kabupaten Nias	Sumatera Utara	58,960
221	Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan	58,728
222	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	58,631
223	Kabupaten Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	58,396
224	Kabupaten Lebong	Bengkulu	58,350
225	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Lampung	58,254
226	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sulawesi Utara	58,213
227	Kabupaten Fak Fak	Papua Barat	57,762
228	Kabupaten Pesisir Barat	Lampung	57,760
229	Kabupaten Tangerang	Banten	57,685
230	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Sulawesi Selatan	57,656
231	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	57,013
232	Kabupaten Kaur	Bengkulu	56,805
233	Kabupaten Boven Digoel	Papua	56,594
234	Kabupaten Morowali	Sulawesi Tengah	56,498
235	Kabupaten Barito Utara	Kalimantan Tengah	56,452
236	Kabupaten Donggala	Sulawesi Tengah	56,378

237	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	56,280
238	Kabupaten Lingga	Kepulauan Riau	56,220
239	Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	56,053
240	Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah	55,787
241	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	55,761
242	Kabupaten Lampung Selatan	Lampung	55,511
243	Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan Timur	55,448
244	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	55,363
245	Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	55,065
246	Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara	54,917
247	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	54,827
248	Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	54,806
249	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	54,451
250	Kabupaten Subang	Jawa Barat	54,291
251	Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara	54,248
252	Kabupaten Pidie	Aceh	54,229
253	Kabupaten Aceh Tengah	Aceh	54,207
254	Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh	54,137
255	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu	54,062
256	Kabupaten Merauke	Papua	53,924
257	Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	53,765
258	Kabupaten Halmahera Utara	Maluku Utara	53,523
259	Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah	53,457
260	Kabupaten Way Kanan	Lampung	53,388
261	Kabupaten Nias Barat	Sumatera Utara	53,375
262	Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	52,977
263	Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh	52,883
264	Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat	52,626
265	Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah	52,539
266	Kabupaten Kampar	Riau	52,251
267	Kabupaten Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	52,225
268	Kabupaten Batu Bara	Sumatera Utara	52,010
269	Kabupaten Takalar	Sulawesi Selatan	51,900
270	Kabupaten Mesuji	Lampung	51,801
271	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara	51,726
272	Kabupaten Asmat	Papua	51,703
273	Kabupaten Merangin	Jambi	51,492
274	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara	51,469
275	Kabupaten Bireuen	Aceh	51,299
276	Kabupaten Raja Ampat	Papua Barat	51,244
277	Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara	50,779
278	Kabupaten Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	50,659
279	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	50,400

280	Kabupaten Dairi	Sumatera Utara	50,268
281	Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	50,220
282	Kabupaten Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	50,190
283	Kabupaten Lampung Utara	Lampung	50,180
284	Kabupaten Kaimana	Papua Barat	50,022
285	Kabupaten Tanggamus	Lampung	49,942
286	Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah	49,759
287	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah	49,286
288	Kabupaten Muna Barat	Sulawesi Tenggara	49,280
289	Kabupaten Seram Bagian Timur	Maluku	49,198
290	Kabupaten Aceh Singkil	Aceh	49,166
291	Kabupaten Aceh Selatan	Aceh	49,058
292	Kabupaten Wakatobi	Sulawesi Tenggara	49,006
293	Kabupaten Pringsewu	Lampung	48,975
294	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	48,542
295	Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat	48,501
296	Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah	48,334
297	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	48,109
298	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	48,067
299	Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat	48,030
300	Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara	47,863
301	Kabupaten Aceh Barat	Aceh	47,742
302	Kabupaten Buru Selatan	Maluku	47,544
303	Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Utara	47,461
304	Kabupaten Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	47,191
305	Kabupaten Bener Meriah	Aceh	47,129
306	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	47,036
307	Kabupaten Ogan Ilir	Sumatera Selatan	46,891
308	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Maluku	46,247
309	Kabupaten Toba Samosir	Sumatera Utara	46,133
310	Kabupaten Muko Muko	Bengkulu	45,964
311	Kabupaten Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	45,935
312	Kabupaten Buol	Sulawesi Tengah	45,824
313	Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	45,398
314	Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	45,224
315	Kabupaten Simeulue	Aceh	45,172
316	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	45,154
317	Kabupaten Sarmi	Papua	44,973
318	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	44,972
319	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	44,762

320	Kabupaten Kepulauan Sula	Maluku Utara	43,886
321	Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung	43,782
322	Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara	43,521
323	Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat	43,389
324	Kabupaten Gayo Lues	Aceh	43,233
325	Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Utara	42,988
326	Kabupaten Toli Toli	Sulawesi Tengah	42,663
327	Kabupaten Lampung Timur	Lampung	42,578
328	Kabupaten Jayapura	Papua	42,543
329	Kabupaten Bungo	Jambi	42,286
330	Kabupaten Keerom	Papua	42,233
331	Kabupaten Ngada	Nusa Tenggara Timur	41,767
332	Kabupaten Padang Lawas	Sumatera Utara	41,763
333	Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku	41,561
334	Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat	41,017
335	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	40,975
336	Kabupaten Supiori	Papua	40,775
337	Kabupaten Lampung Barat	Lampung	40,475
338	Kabupaten Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	40,353
339	Kabupaten Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	40,208
340	Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah	39,963
341	Kabupaten Tana Toraja	Sulawesi Selatan	39,890
342	Kabupaten Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	39,813
343	Kabupaten Halmahera Timur	Maluku Utara	39,619
344	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	39,388
345	Kabupaten Mamberamo Raya	Papua	39,229
346	Kabupaten Nabire	Papua	38,94
347	Kabupaten Tebo	Jambi	38,666
348	Kabupaten Maluku Tengah	Maluku	38,665
349	Kabupaten Kupang	Nusa Tenggara Timur	38,538
350	Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	38,470
351	Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah	38,262
352	Kabupaten Muna	Sulawesi Tenggara	37,870
353	Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	37,418
354	Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara	37,319
355	Kabupaten Dogiyai	Papua	37,016
356	Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	36,638
357	Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	36,411
358	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	36,207
359	Kabupaten Pidie Jaya	Aceh	35,783
360	Kabupaten Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	35,726
361	Kabupaten Minahasa	Sulawesi Utara	35,665
362	Kabupaten Kepulauan Aru	Maluku	35,509

363	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	35,142
364	Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara	35,063
365	Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara	34,683
366	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	34,531
367	Kabupaten Kerinci	Jambi	34,488
368	Kabupaten Manggarai	Nusa Tenggara Timur	34,140
369	Kabupaten Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	34,109
370	Kabupaten Sorong	Papua Barat	34,076
371	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	34,028
372	Kabupaten Aceh Utara	Aceh	34,001
373	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	33,512
374	Kabupaten Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	32,415
375	Kabupaten Alor	Nusa Tenggara Timur	32,209
376	Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur	32,160
377	Kabupaten Kepulauan Meranti	Riau	31,705
378	Kabupaten Mimika	Papua	31,441
379	Kabupaten Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	30,544
380	Kabupaten Teluk Bintuni	Papua Barat	30,529
381	Kabupaten Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	28,418
382	Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	27,309
383	Kabupaten Malaka	Nusa Tenggara Timur	27,164
384	Kabupaten Aceh Barat Daya	Aceh	27,100
385	Kabupaten Konawe	Sulawesi Tenggara	27,012
386	Kabupaten Jember	Jawa Timur	26,317
387	Kabupaten Minahasa Tenggara	Sulawesi Utara	25,161
388	Kabupaten Halmahera Tengah	Maluku Utara	24,366
389	Kabupaten Halmahera Selatan	Maluku Utara	23,803
390	Kabupaten Maybrat	Papua Barat	22,680
391	Kabupaten Halmahera Barat	Maluku Utara	22,589
392	Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat	21,950
393	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	21,140
394	Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	20,912
395	Kabupaten Pulau Taliabu	Maluku Utara	20,398
396	Kabupaten Pegunungan Arfak	Papua Barat	19,500
397	Kabupaten Nagan Raya	Aceh	18,933
398	Kabupaten Tambrau	Papua Barat	17,615
399	Kabupaten Sorong Selatan	Papua Barat	15,676
400	Kabupaten Lembata	Nusa Tenggara Timur	15,319
401	Kabupaten Mamberamo Tengah	Papua	13,125
402	Kabupaten Yahukimo	Papua	13,075
403	Kabupaten Puncak Jaya	Papua	13,000
404	Kabupaten Deiyai	Papua	12,925

405	Kabupaten Puncak	Papua	12,900
406	Kabupaten Nduga	Papua	12,850
407	Kabupaten Mappi	Papua	12,800
408	Kabupaten Yalimo	Papua	12,750
409	Kabupaten Lanny Jaya	Papua	12,750
410	Kabupaten Paniai	Papua	12,650
411	Kabupaten Intan Jaya	Papua	12,625
412	Kabupaten Waropen	Papua	12,350
413	Kabupaten Tolikara	Papua	11,775
414	Kabupaten Pegunungan Bintang	Papua	11,475
415	Kabupaten Jayawijaya	Papua	9,000

A.N. MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA
PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



HOMAL LUKMAN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAYANAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL PENILAIAN KINERJA PTSP DAN KINERJA PPB
 PEMERINTAH KOTA

No	Nama Pemerintah Kota (Urutan Disusun Berdasarkan Nilai)		
	Kategori : Sangat Baik (Nilai 80 s.d 100)		
	Kota	Provinsi	Nilai
1	Kota Semarang	Jawa Tengah	91,350
2	Kota Bekasi	Jawa Barat	91,259
3	Kota Bandung	Jawa Barat	91,206
4	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	90,655
5	Kota Palu	Sulawesi Tengah	90,130
6	Kota Tegal	Jawa Tengah	90,118
7	Kota Pekanbaru	Riau	90,051
8	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	89,275
9	Kota Cimahi	Jawa Barat	89,199
10	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	88,529
11	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	88,268
12	Kota Palembang	Sumatera Selatan	86,759
13	Kota Salatiga	Jawa Tengah	86,560
14	Kota Bogor	Jawa Barat	86,550
15	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	86,282
16	Kota Kediri	Jawa Timur	85,619
17	Kota Banda Aceh	Aceh	84,650
18	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	83,513
19	Kota Gorontalo	Gorontalo	83,413
20	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	82,795
21	Kota Magelang	Jawa Tengah	82,484
22	Kota Surakarta	Jawa Tengah	82,466
23	Kota Medan	Sumatera Utara	81,858
24	Kota Tangerang	Banten	81,313
25	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	80,648
26	Kota Surabaya	Jawa Timur	80,365
27	Kota Pariaman	Sumatera Barat	80,313

Kategori : Baik (Nilai 60 s.d 79,99)			
	Kota	Provinsi	Nilai
28	Kota Serang	Banten	79,399
29	Kota Batam	Kepulauan Riau	79,295
30	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	79,051
31	Kota Tangerang Selatan	Banten	79,024
32	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	78,681
33	Kota Dumai	Riau	77,886
34	Kota Mojokerto	Jawa Timur	75,946
35	Kota Bengkulu	Bengkulu	75,834
36	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	75,182
37	Kota Cilegon	Banten	74,728
38	Kota Bontang	Kalimantan Timur	73,805
39	Kota Cirebon	Jawa Barat	73,551
40	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	73,094
41	Kota Blitar	Jawa Timur	72,981
42	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat	72,435
43	Kota Madiun	Jawa Timur	71,867
44	Kota Denpasar	Bali	71,660
45	Kota Depok	Jawa Barat	71,485
46	Kota Padang	Sumatera Barat	71,398
47	Kota Bandar Lampung	Lampung	71,337
48	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	70,691
49	Kota Ambon	Maluku	70,472
50	Kota Malang	Jawa Timur	70,177
51	Kota Probolinggo	Jawa Timur	69,733
52	Kota Metro	Lampung	69,389
53	Kota Banjar	Jawa Barat	68,575
54	Kota Jayapura	Papua	67,821
55	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	67,711
56	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	67,246
57	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	66,427
58	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	66,404
59	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	66,375
60	Kota Pasuruan	Jawa Timur	65,862
61	Kota Tual	Maluku	65,111
62	Kota Sungai Penuh	Jambi	64,968
63	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	64,661
64	Kota Sukabumi	Jawa Barat	63,551
65	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	63,461
66	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	63,411
67	Kota Lhokseumawe	Aceh	60,931
68	Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara	60,821
69	Kota Solok	Sumatera Barat	60,626

Kategori : Kurang Baik (Nilai ≤ 59,99)			
	Kota	Provinsi	Nilai
70	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	59,284
71	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	58,796
72	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	56,532
73	Kota Sabang	Aceh	56,324
74	Kota Manado	Sulawesi Utara	55,862
75	Kota Jambi	Jambi	55,028
76	Kota Ternate	Maluku Utara	54,842
77	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	54,348
78	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	53,375
79	Kota Sibolga	Sumatera Utara	52,872
80	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	52,548
81	Kota Bitung	Sulawesi Utara	51,849
82	Kota Batu	Jawa Timur	51,788
83	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	49,825
84	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	45,920
85	Kota Pematang Siantar	Sumatera Utara	43,918
86	Kota Binjai	Sumatera Utara	42,245
87	Kota Langsa	Aceh	39,855
88	Kota Subulussalam	Aceh	39,798
89	Kota Sorong	Papua Barat	38,523
90	Kota Padangsidimpuan	Sumatera Utara	35,694
91	Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	35,560
92	Kota Bau Bau	Sulawesi Tenggara	35,254
93	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	20,718

A.N. MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN/
 SEKRETARIS UTAMA,



KEMAL LUKMAN